

Pesan Jokowi kepada Relawan hingga Sinyal Capres Pilihnannya

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan kepada para relawannya terkait sosok yang akan meneruskan kepemimpinan selepas 2024 mendatang.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang diikuti oleh ribuan relawan dari berbagai daerah di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (26/10).

Sebelumnya, Jokowi lebih dulu membeberkan capaian kinerja pemerintah. Mulai dari sektor pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan wisata, penghentian ekspor bahan mentah hingga pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KIT) G20.

Jokowi berharap, perekonomian Indonesia bisa tumbuh pesat pada 2045 dengan berpijak kepada pembangunan dan kebijakan yang sudah diterapkan saat ini. "Yang sudah kita bangun harus kita jaga keberlanjutannya. Setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama, bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029 tapi untuk Indonesia emas 2045 dan seterusnya," ujar Jokowi.

"Oleh karena itu jangan hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan jangka pendek, kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah kita mulai," katanya.

Jokowi juga menilai stabilitas ekonomi, pembangunan dan kondisi sosial saat ini sudah "on the track". Kondisi ini harus terus dilanjutkan. Karena itu, masyarakat harus memiliki pemimpin yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan sebelumnya.

Di hadapan para relawan, Jokowi pun mengingatkan agar berhati-hati dalam menajutkan pilihannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menganjurkan agar para relawan memilih pemimpin yang mengerti perasaan rakyat.

"Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti, yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat," kata Jokowi.

"Pilih nanti di 2024 pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju?" ujarnya. ● han

Prabowo Cinta Bola, Tapi Ogah Nonton Piala Dunia 2022, Kenapa?

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sebagai pencinta sepak bola, namun tidak mau menyaksikan Piala Dunia (World Cup) 2022 di Qatar. Kenapa?

"Saya pecinta sepak bola, tapi saya tidak mau nonton World Cup. Di TV pun saya enggak mau karena Indonesia tidak bermain," kata Prabowo dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, seperti dikutip pada Minggu (27/11).

Dia menilai Indonesia semestinya sudah bisa berlaga di Piala Dunia. Sebab, lanjut Prabowo, banyak negara yang lebih kecil dapat berpartisipasi, seperti Ghana dan Nigeria. "Kemarin, Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia?" tanya Prabowo dalam sambutannya pada

acara Musyawarah Nasional (Munas) XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/11).

Itu sebabnya Prabowo mengambil peran mengangkat derajat timnas Garuda agar bisa berlaga di kancah global. Dia berencana mengajak atlet-atlet muda sepak bola yang berbakat untuk mengikuti akademi terbaik dunia di Qatar.

"Salah satu akademi sepak bola yang terbaik sekarang (ada) di Qatar. Banyak anak-anak dari Eropa sekarang sekolah di sana. Saya sudah minta izin ke pemimpinya Qatar, 'Indonesia bisa enggak kirim (ke akademi)? Tapi, tunggu World Cup selesai. Habis World Cup selesai, saya pergi mengantar anak-anak kita,' kata Prabowo. ● mei



PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA
Dua siswa SMP Muhammadiyah 8 Solo bersiap untuk mengikuti aksi dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (27/11). Kegiatan tersebut digelar sebagai kampanye hidup sehat tanpa rokok sekaligus mengajak warga untuk bijak mengelola sampah rumah tangga.

Jokowi Sebut Ciri-ciri Pemimpin, Rambut Putih dan Wajah Berkerut

JAKARTA (IM) - Perteman Jokowi dengan relawan Gerakan Nusantara Bersatu diwarnai pernyataan soal ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat, salah satunya soal rambut putih.

"Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua ada. Ada itu," kata Jokowi dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (26/11).

Jokowi juga meminta relawan untuk hati-hati memilih pemimpin yang berwajah 'cling'. Jika pemimpin tak ada kerutan di wajah, Jokowi meminta relawan hati-hati.

"Saya ulang. Jadi, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya cling, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya kalau putih semua 'wah mikir rakyat ini,' katanya.

Politisi PKS menanggapi pernyataan Jokowi soal ciri-ciri pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang banyak keriput dan berambut putih. PKS menyebut pemimpin yang bagus itu dinilai dari rekam jejak, bukan tampilan fisik.

"Melihat pemimpin bagus atau tidak itu bukan dari tampilan fisik, tapi dari rekam jejaknya. Kita lihat dari kebijakan-kebijakannya. Kita lihat dari sikap politiknya," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Minggu (27/11).

Kholid menegaskan penampilan fisik tidak ada kaitannya dengan kemampuan memimpin bangsa. Rambut hitam, putih, cokelat, keriting, lurus, ikal, itu kan kekhasan setiap orang."

"Tampilan fisik itu tidak ada kaitannya dengan kemampuan dia memimpin bangsa. Rambut hitam, putih, cokelat, keriting, lurus, ikal, itu kan kekhasan setiap orang," ujarnya.

Kholid tidak khawatir dengan kode rambut putih dan keriput dari Jokowi yang tidak menggambarkan capres yang rencananya akan didukung PKS, Anies Baswedan. Dia justru membeberkan Anies Baswedan punya rekam jejak yang baik selama memimpin Jakarta.

"Pak Anies punya rekam jejak kepemimpinan, bisa dicek di Jakarta. Keuksesan publik Jakarta tinggi dan banyak prestasi yang ditorehkan," tuturnya. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



ICW Ungkap Konsorsium Pemenang Tender BTS Kemenkominfo yang Diusut Kejagung

Dari 4.200 titik BTS 4G yang dikerjakan, ternyata yang siap beroperasi hanya 2.406 titik atau sekitar 57 persen saja.

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap sejumlah perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo).

Kejaksanaan Agung mengendus adanya dugaan pelanggaran tender dalam pengadaan proyek bernilai triliunan tersebut.

Peneliti ICW Agus Sunaryanto mengatakan, proyek tersebut dibagi menjadi dua tahap dengan jumlah keselu-

ruhan tower yang dibangun sebanyak 7.904 titik.

"Fase pertama yang saat ini bermasalah itu rencananya di 4.200 titik dibagi menjadi 5 paket pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa konsorsium," kata Agus dalam konferensi pers yang disiarkan secara online, Minggu (27/11).

Perusahaan tersebut yakni PT Fiberhome, PT Telkom Infra, dan Multi Trans Data yang mengerjakan paket 1 dan 2. Kemudian, PT Aplikasinusa Lintas Arta, Huwaci, PT SEI

yang mengerjakan paket 3. Lalu, PT IBS dan ZTE Corporation yang mengerjakan paket 4 dan 5.

Berdasarkan data yang diperoleh ICW, 90 persen anggaran proyek itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, dana tersebut berasal dari Universal Service Obligation (USO).

Agus menuturkan, berdasarkan laporan yang diterima ICW, pembangunan proyek BTS 4G tahap pertama ini mengalami keterlambatan.

"Jadi dari rencana awal selesai maret 2022 kemudian diperpanjang menjadi September 2022," kata Agus.

Per Maret, kata Agus, baru terdapat 1.679 titik BTS yang

terintegrasi. Akibatnya, terjadi backlog pada 2.521 titik. Dari ribuan titik tersebut, sebanyak 13,7 persen di antaranya sedang dalam tahap instalasi, 9,7 persen siap diinstal, dan 76,6 persen titik BTS belum siap diinstal.

Karena tidak sesuai target, proyek tersebut kemudian diperpanjang pada September 2022.

"Ternyata berdasarkan data yang kami peroleh perkembangannya tidak signifikan. Jadi dari 4.200 titik yang dikerjakan yang siap beroperasi hanya 2.406 titik atau sekitar 57 persen," ujar Agus.

Sebagai informasi, saat ini Kejaksanaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G. Proyek ini dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo.

PENDATAAN PENGUNSI KORBAN GEMPA CIANJUR

Sejumlah pengungsi berada di lokasi posko pengungsian, Kampung Binong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu (27/11). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan survei data pengungsi terpilah untuk mengetahui distribusi usia, jenis kelamin, dan kelompok rentan di pos pengungsian, dan hingga Sabtu (26/11) pukul 17.00 jumlah warga yang mengungsi akibat gempa tercatat 73.693 orang.

Korps Adhyaksa menduga negara mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun. Meski demikian, jumlah tersebut masih sementara karena saat ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang menangani perkara tersebut masih terus melakukan penghitungan.

Kejaksanaan Agung juga telah mengeledah kantor Kemenkominfo dan kantor PT Adyawinta Telecommunication & Electrical di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Dari pengeledahan tersebut, telah dilakukan penyitaan berupa dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik yang terkait dengan perkara dimaksud," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksanaan Agung, Ketut Suredana, dalam keterangan pers yang diterima pada Selasa (8/11) lalu. ● han

Cegah Paham Radikal, Pemerintah akan Bangun Asrama Mahasiswa di Berbagai Kota

MAKASSAR (IM) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat Gani menyebut pemerintah akan membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Makassar dan berbagai kota lain.

Asrama tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh Indonesia, yang menempuh pendidikan di Kota Makassar dan sekitarnya. Begitu juga dengan AMN di kota lainnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 106 tahun 2021, Asrama Mahasiswa Nusantara adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 106 tahun 2021, AMN akan dibangun di beberapa daerah termasuk Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sudah menyiapkan lahan yang luasnya mencapai dua hektare.

Pemprov Sulsel telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan terkait pembangunan

AMN di Makassar. "Pembangunan AMN ini sudah dalam proses, surat-surat (dokumen) sudah disiapkan oleh Biro Aset dan sudah siap untuk ditindaklanjuti," katan kepada wartawan, Minggu (27/11).

Rencananya, AMN di Makassar akan dibangun di atas tanah seluas 20.000 meter persegi, berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 7, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-pol) Sulsel, Ansyar menambahkan bahwa untuk pembangunan AMN direncanakan akan menggunakan lahan seluas kurang lebih dua hektare.

"Untuk status penggunaan lahannya itu, kalau tidak salah yang disampaikan dari Biro Aset masih sertifikat induk," kata Ansyar.

Dalam merealisasikan AMN ini, Badan Intelijen Negara diketahui memegang peranan yang sangat penting.

Bukan hanya itu, terkait pengelolaan dan pembinaan mahasiswa, BIN juga akan bekerja sama dengan Ke-

menpora dan Kemendikbud Ristek. Hal ini dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan, nasionalis, memiliki rasa toleransi dan bisa bersatu membangun Indonesia yang jauh lebih baik lagi.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan sempat mengungkapkan temuan data bahwa ternyata masih cukup banyak mahasiswa yang terpapar oleh paham radikal, yakni sebanyak 39 persen dan menyebar hingga di sebanyak 15 provinsi di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, pembinaan oleh BIN di AMN menjadi upaya yang sangat efektif dalam perwujudan perawatan kebhinnekaan. Seperti diketahui bahwa AMN nantinya akan dibangun di beberapa daerah seperti di Makassar, Minahasa, Jakarta, Malang, dan Bantul (Yogyakarta).

AMN Surabaya telah selesai dibangun pada Mei 2022 lalu dan mampu menampung sekitar 528 mahasiswa, dan diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di Surabaya. ● han



SENINAR PEMILU BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA
Kepala Biro LKBN ANTARA Jawa Timur Rahmat Hidayat (kiri) berbingcang bersama Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam (tengah), dan Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu Jawa Timur Mahmud Suhermono (kanan) di sela seminar nasional bertajuk Retrospeksi Demokrasi Elektoral dalam Bayang-Bayang Pandemi di ruang audio visual Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno Blitar, Jawa Timur, Sabtu (26/11). Seminar nasional yang diadakan LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, GFJA, dan KPU Kota Blitar tersebut diikuti oleh ratusan pelajar dari berbagai SMA dan mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Timur untuk memberikan pemahaman tentang Pemilu.

KPK Minta Pihak Perusahaan yang Urus HGU di Kanwil BPN Riau Kooperatif

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan petinggi berbagai perusahaan yang mengurus izin hak guna usaha (HGU) di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Riau, agar bersikap kooperatif. Sebab, beberapa dari mereka dinilai menghindari pemeriksaan tim penyidik KPK.

KPK saat ini sedang mengusut dugaan suap pengurusan HGU di Kanwil BPN Riau dan telah menetapkan pemimpin lembaga tersebut, M Syahrir sebagai tersangka.

"KPK juga mengingatkan berbagai pihak yang dipanggil patut untuk kooperatif hadir khususnya para perusahaan yang mengurus izin HGU," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (27/11).

Ali tidak membeberkan nama para saksi dari pihak perusahaan yang dipanggil penyidik. Ia hanya meminta keterangan dengan jujur.

"(Saksi diminta) menyampaikan dengan jujur serta terbuka di hadapan Tim Penyidik," katanya.

Selain itu, KPK juga meminta masyarakat memberikan informasi terkait pelayanan pengurusan di Kanwil BPN Riau di bawah kepemimpinan M Syahrir.

Informasi yang diminta KPK berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGU dalam perkara ini.

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir sebagai ter-

sangka penerima suap dugaan suap pengurusan perpanjangan HGU.

Selain Syahrir, KPK juga menetapkan dua orang dari pihak swasta yakni, pemilik saham PT Adimulia Agrolestari, Frank Wijayan dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka pemberi suap.

Kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan perkara suap perizinan perkebunan kelapa sawit yang menjerat mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra.

Dalam perkara ini, Syahrir diduga menerima suap 120.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 1,2 miliar. Suap diberikan Frank melalui Sudarso terkait pengurusan perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari. Saat ini, KPK telah menahan Frank di rumah tahanan (Rutan) Polres Jakarta Selatan.

Sementara, Sudarso tengah mendekam di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung. Baca juga: Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir Jadi Tersangka Suap Pengurusan HGU Adapun Syahrir belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan penyidik.

KPK mengingatkan, Syahrir segera menyerahkan diri. Jika ia tidak bersikap kooperatif, KPK mengancam akan melakukan upaya paksa. KPK memerintahkan kepada Saudara M Syahrir yang sudah dilakukan pemanggilan tapi tidak datang untuk segera menyerahkan diri," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (27/10) lalu. ● mei

PENGUMUMAN

PT Dialogo Utama Internasional, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 20 Oktober 2022, pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain sebagai berikut:

- Kompensasi hak tagih PT Global Trans Sentosa kepada Perseroan, sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta Rupiah) dengan setoran saham di dalam Perseroan sebanyak 22.000 (dua puluh dua ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Kompensasi hak tagih PT Vetra Indonesia kepada Perseroan, sebesar Rp10.033.500.000 (sepuluh miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan setoran saham di dalam Perseroan sebanyak 100.335 (seratus ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah); dan
- Kompensasi hak tagih Bapak Eric Faivre kepada Perseroan, sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dengan setoran saham di dalam Perseroan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).

Pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.

Jakarta, 28 November 2022
Direksi
PT Dialogo Utama Internasional